

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- A.Z. Abidin dan A. Hamzah. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Diedit oleh Musayyedah dan Nirwana Rasyid. 1 ed. Jakarta: PT Yarsif Watampone, 2010.
- Barda Nawawi Arief. *Hukum Pidana Lanjut*. 4 ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2012.
- E.Y Kanter dan S.R. Sianturi. *asas-asas hukum pidana di indonesia dan penerapannya*. 3 ed. Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Hanifah Erma. *Stop Korupsi*. Diedit oleh Rahayu Herni. Tangerang: Loka Aksara, 2019. <https://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publications/books/137474>.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Diedit oleh Yunus Ahsan. 3 ed. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Ishaq. *Hukum Pidana*. Diedit oleh Yayat Sri Hayati. 1 ed. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2020.
- Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. 2 ed. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2014.
- Maylanny Christin. *Dongeng Anti Korupsi*. Diedit oleh Lita Juliantini. Jatinangor: Bitread Publishing, 2017.
- Mukti, Arto. "Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama." *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, 2004, 243.
- Nursya. "Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Pada Tindak Pidana Korupsi." *Alumga dan Mandiri*, 2020, 75.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Retno Ajeng. *Membasmi Korupsi*. Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017. <https://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publications/books/100989/>.
- Sasongko Warso. *Korupsi*. Yogyakarta: Relasi Inti Media, 2017. <https://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publications/books/101038>.

- Subur Sukrisno. *Sejarah Korupsi di Indonesia*. Diedit oleh Dwi M Nastiti. 1 ed. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2017.
- Syamsuddin Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Diedit oleh Tarmizi. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Wdi Nugroho. *Mudahnya Korupsi*. Diedit oleh Abd. Kholiq. Relasi Inti Media, 2017. <https://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publications/books/100993/>.
- Yurizal. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Diedit oleh Tim MNC Publishing. 1 ed. Malang: Media Nusa Creative, 2017.

## B. Jurnal

- Agus Setyowati, Ike Indra. “Pembantuan Dan Penyertaan (Deelmening) Dalam Kasus Perkosaan Anak.” *Media Iuris* 1, no. 2 (2018): 284–285. <https://doi.org/10.20473/mi.v1i2.8831>.
- Firsta, El, Nopsiamti Ar, dan Dessy Rakhmawati. “PAMPAS : Journal Of Criminal Law Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Bersama-Sama dikarenakan dampaknya yang luar biasa , tidak hanya merusak keuangan publik dan dan illegal untuk mendapat” 4 (2023): 184–190.
- Hafrida dan Yulia Monita, “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Putusan Lepas (*onslag*) terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi,” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 4, no. 1 (2023), 63–64 :<https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.23585>.
- Kurnia, Vani, Sahuri Lasmadi, dan Elizabeth Siregar. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Kewenangan Jaksa sebagai Penyidik dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, no. 3 (2021): 1–11. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11084>.
- Laoh Trivo Clinton. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana White Collar Crime.” *Lex Crimen* 8, no. 12 (2020): 82.
- Maliyanto Effendi, Moh. Zeinudin, Miftahul Munir. “Konsep Penyertaan Tindak Pidana Dan Penggelapan Dengan Pemberatan Berdasarkan Interpretasi Hukum.” *Adil: Jurnal Hukum* 12 (2021): 84. <file:///C:/Users/User/Downloads/yuni,+4.+MALIYANTO.pdf>.

- Noviacahyani, Wahyu, dan Elly Sudarti. "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 3, no. 3 (2023): 264–282. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.23585>.
- Noviana Permanasari. "Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat No. 10/Pid.Sus-Tpk/2021/Pt Dki." *Syntax Idea* 3, no. 1 (2021): 2161. <http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dSPACE.UC.AC.ID/handle/123456789/1288>.
- Nurhafifah dan Rahmiati, Kanun. "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait Hal yang Memberatkan dan Meringankan Judge Consideration Regarding The Imposition Of Punishment Relating To Criminate And Incriminate Decision Oleh: Nurhafifah dan Rahmiati." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 66 (2015): 344–345..
- Prasetiono, Yogi, Zaenal Arifin, dan Kukuh Sudarmanto. "Implementasi Pemidanaan Pelaku Penyertaan (*Deelneming*) Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022): 647. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5241>.
- Pratiwi, Siswantari. "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 69–80. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.677>.
- Purba, Devica Anjelina, Made Sugi Hartono, dan Muhamad Jodi Setianto. "Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Penerapan Pidana Korupsi" 1 (2023): 142–155.
- Safitri, Zahra Awaliany, Adisty Aulia Rosadi, Gian Muzakir Hayat, Dwi Desi Yayi, Fakultas Hukum, Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, et al. "Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan," no. 7 (2023).
- Sembiring, Imentari Siin, Elly Sudarti, Andi Najemi, dan Urgensi Perumusan. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama Sama (Analisis Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn Jmb Dan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb)." 1, no. 1 (2020): 4–5.
- Yulia Monita, Rosmidah dan Erwin. "Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi Di Kalangan Pelajar Di Kota Sungai Penuh." *Journal Of Criminal Law* 1, no. 2 (2020): 324–341.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, *Undang Undang Dasar* Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945

-----, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

-----, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

-----, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

-----, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

-----, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

### D. Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff>. Diakses pada 18 Maret 2024, Pukul 19.15 WIB.

<https://www.situshukum.com/2021/03/penyertaan-deelneming.html>. Diakses pada 10 Maret 2024, Pukul 20.03 WIB.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-korupsi-dan-aturan-yang-di-indonesia-lt5e6247a037c3a/>. Diakses pada 6 Maret 2024, Pukul 18.15 WIB.

<https://www.negarahukum.com/penyertaan-deelneming.html>. Diakses pada 18 Maret 2024, Pukul 20.15 WIB.

<https://pinterhukum.or.id/mengenal-deelneming-concurnus-dan-klachtdelict-dalam-hukum-pidana-indonesia/> Diakses pada 18 Maret 2024, Pukul 21.15 WIB.

<https://sugalilawyer.com/hal-yang-memberatkan-dan-meringankan-pidana/>. Diakses pada 6 Maret 2024, Pukul 17.07 WIB.